



8.066 Anak Putus Sekolah di Kota Pendidikan

YOGYA, TRIBUN - Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal luas sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Namun, predikat mentereng itu nyatanya tak menjamin bahwa seluruh anak mendapatkan akses pendidikan secara paripurna, karena masih ada yang putus sekolah.

Pemerintah DIY mencatat sebanyak 8.066 anak di wilayahnya tidak bersekolah. Inspektur DIY yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc., mengungkapkan bahwa angka tersebut diperoleh melalui proses penyaringan data secara ketat.

Berdasarkan pembaruan *Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS)* Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI per 5 April 2026, total ATS di DIY awalnya tercatat sebanyak 16.010 penduduk yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu belum pernah bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (*drop out*).

"Dari jumlah 16.010 terse-

but, sebanyak 5.603 data belum diverifikasi dan 10.407 data telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dengan dibantu perangkat desa atau kelurahan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari 10.407 data anak yang sudah diverifikasi, sebanyak 2.341 penduduk ternyata masih bersekolah dan sudah lulus atau menamatkan jenjang SMA sederajat, sementara 8.066 penduduk lainnya terkonfirmasi tidak bersekolah," paparnya, Selasa (14/4).

Jumlah siswa putus sekolah itu tersebar di Kabupaten Sleman (2.810 anak), Gunungkidul (2.048 anak), Bantul (1.715 anak), Kulon Progo (953 anak), dan Kota Yogyakarta (540 anak). Faktor pemicu anak tidak sekolah cukup beragam, mulai dari bekerja (2.067 anak), tidak mau bersekolah (1.170 anak), menikah atau mengurus rumah tangga (411 anak), serta merasa cukup dengan tingkat pendidikan saat ini (242 anak).

Ada pula faktor tidak ada biaya (186 anak), jarak sekolah jauh dari rumah (77

anak), masalah kesehatan atau disabilitas (294 anak), hingga pengaruh teman (82 anak). Selain itu, ada faktor kekerasan, perundungan, atau trauma di sekolah (10 anak), tidak memiliki seragam (1 anak), dan masalah dokumen kependudukan. Adapun kategori lainnya mencapai 3.083 anak.

"Terdapat pula data spesifik mengenai anak yang dikeluarkan dari sekolah sebanyak 8 anak dan yang mengundurkan diri sebanyak 92 anak," jelas Setiadi.

Dilihat dari sebaran wilayah, pola penyebab antarkabupaten dan kota cenderung serupa dengan dominasi faktor bekerja dan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, serta pilihan individu. Penanganan perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor, mencakup intervensi ekonomi, sosial, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005